

POLEMIK KOPERASI DESA MERAH PUTIH: ANTARA PEMBERDAYAAN EKONOMI DAN TANTANGAN DEMOKRASI DESA

Septi Sa'baniyah, Bilqist Kultsum Sitie Hanniffah, Nurauliya Khoirunnisa, Aos Kuswandi.

^{1,2,3,4} PROGRAM STUDINYA ILMU KOMUNIKASI, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA, KOTA BANDUNG, INDONESIA

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juli 2026

Revised Juli 2026

Accepted Juli 2026

Available Juli 2026

septisabaniyahh@gmail.com

bilqssy@gmail.com

nurauliyakhms@gmail.com

koeswandi.all@gmail.com

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.

*Copyright © 2023 by Author.
Published by Cahaya Ilmu Bangsa
Institute*

Abstrak

Program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes MP) dirancang pemerintah sebagai sarana pemberdayaan ekonomi berbasis desa, namun implementasinya memunculkan polemik terkait relasi kekuasaan di tingkat desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis struktur kelembagaan Kopdes MP dalam perspektif sistem politik Indonesia serta mengidentifikasi tantangan demokrasi desa yang muncul akibat kebijakan tersebut. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan dan analisis kebijakan, bersumber dari kajian, regulasi pemerintah, dan pemberitaan media nasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa Kopdes MP berpotensi memperkuat kapasitas ekonomi desa, tetapi di sisi lain berisiko menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara struktur koperasi dengan lembaga demokrasi desa seperti musyawarah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta membuka peluang dominasi kepentingan elite politik local maupun pusat dalam pengelolaan

kebijakan. Penelitian ini menekankan pentingnya penguatan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam tata kelola program sebagai upaya menjaga keseimbangan antara tujuan pemberdayaan ekonomi dan prinsip demokrasi desa.

Kata Kunci: koperasi desa merah putih, demokrasi desa, desentralisasi, elite capture, pemberdayaan ekonomi.

Abstract

The Red and White Village Cooperative (Kopdes MP) program was designed by the Indonesian government as a village-based economic empowerment initiative. However, its implementation has generated debate regarding power relations at the village level. This study aims to analyze the institutional structure of Kopdes MP within the perspective of Indonesia's political system and to identify the challenges to village democracy arising from the policy. The study employs a descriptive qualitative method using a literature review and policy analysis approach, drawing on academic literature, government regulations, and reports from national media. The findings indicate that Kopdes MP has the potential to strengthen the economic capacity of villages. Nevertheless, it also poses risks of overlapping authority between the cooperative structure and village democratic institutions, such as the Village Deliberation Forum (Musyawarah Desa) and the Village Consultative Body (Badan Permusyawaratan Desa/BPD), while creating opportunities for the dominance of political elites at both the local and national levels in policy implementation. This study emphasizes the importance of strengthening community participation and ensuring transparency in program governance to maintain a balance between the objectives of economic empowerment and the principles of village democracy.



Keywords: *village cooperative, village democracy, decentralization, elite capture, economic empowerment.*

PENDAHULUAN

Program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes MP) merupakan salah satu kebijakan unggulan pemerintah yang digulirkan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi berbasis desa. Melalui program ini, pemerintah pusat mendorong pembentukan koperasi di setiap desa dengan tujuan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat, memangkas rantai distribusi kebutuhan pokok, serta menyerap potensi ekonomi lokal secara lebih terorganisasi. Namun demikian, sejak digulirkan, implementasi program ini memunculkan berbagai polemik di tingkat akar rumput, mulai dari tumpang tindih kewenangan dengan lembaga desa yang sudah ada seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), hingga kekhawatiran mengenai potensi intervensi elite politik lokal maupun pusat dalam pengelolaan koperasi.

Persoalan ini menjadi relevan untuk dikaji dalam kerangka sistem politik Indonesia karena menyentuh isu desentralisasi, otonomi desa, dan relasi kekuasaan antara negara dan masyarakat sipil di tingkat akar rumput. Desa, sebagai unit pemerintahan terkecil yang telah diberi kewenangan luas melalui Undang-Undang Desa, memiliki mekanisme demokrasi tersendiri berupa musyawarah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai ruang deliberasi warga. Kehadiran Kopdes MP yang bersifat top-down berpotensi menggeser keseimbangan kekuasaan tersebut, terutama jika proses pembentukan dan pengelolaan koperasi tidak melibatkan partisipasi warga secara substantif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dirumuskan ke dalam tiga pertanyaan utama: (1) bagaimana desain kebijakan Koperasi Desa Merah Putih dilihat dari perspektif politik-institusional; (2) sejauh mana program ini berpotensi memperkuat atau justru melemahkan demokrasi desa; dan (3) aktor politik mana saja yang terlibat serta bagaimana relasi kekuasaan yang terbentuk dalam implementasinya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan kerangka teori desentralisasi dan otonomi desa, teori elite capture, serta konsep demokrasi deliberatif di tingkat desa. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis desain kelembagaan Kopdes MP, mengidentifikasi tantangan demokrasi desa yang muncul akibat kebijakan ini, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat menyeimbangkan antara agenda pemberdayaan ekonomi dan penguatan demokrasi lokal.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research) dan analisis kebijakan (policy analysis). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam desain kebijakan dan dinamika relasi kekuasaan yang bersifat kontekstual, bukan mengukur hubungan antarvariabel secara kuantitatif.

Data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, yang meliputi: (1) kajian kebijakan dari lembaga think tank, khususnya Policy Assessment The Indonesian Institute (2026) mengenai Koperasi Desa Merah Putih dan tantangan demokrasi; (2) regulasi resmi pemerintah terkait pembentukan dan tata kelola koperasi desa, seperti peraturan dari Kementerian Desa dan Kementerian Koperasi; dan (3) pemberitaan media nasional (Kompas, Tempo, Antara News) yang meliput implementasi program di berbagai daerah sepanjang tahun 2026.

Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, kategorisasi tema berdasarkan kerangka teori desentralisasi, elite capture, dan demokrasi deliberatif, kemudian penyajian data secara naratif untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Keabsahan data diperkuat dengan triangulasi sumber, yaitu membandingkan temuan dari kajian akademik, dokumen kebijakan resmi, dan pemberitaan media untuk memastikan konsistensi informasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelusuran terhadap kajian kebijakan, regulasi, dan pemberitaan media, ditemukan bahwa implementasi Koperasi Desa Merah Putih menghadirkan dua sisi yang saling berkelindan: di satu sisi berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi desa, namun di sisi lain berpotensi menggeser tatanan demokrasi desa yang telah terbangun melalui mekanisme musyawarah desa dan BPD. Pembahasan berikut disajikan ke dalam tiga sub topik yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian.

Desain Kebijakan Koperasi Desa Merah Putih dalam Perspektif Politik-Institusional

Secara kelembagaan, Koperasi Desa Merah Putih dirancang sebagai badan usaha berbadan hukum koperasi yang dibentuk di setiap desa melalui



musyawarah desa, dengan dukungan pembiayaan dan pendampingan dari pemerintah pusat. Desain ini secara normatif mengedepankan prinsip kekeluargaan dan partisipasi warga sebagaimana asas koperasi pada umumnya. Namun, dalam praktiknya, sifat program yang bersifat instruksi dari atas ke bawah (top-down) menimbulkan kesenjangan antara desain kebijakan di atas kertas dengan realitas implementasi di lapangan, di mana banyak desa membentuk koperasi secara formalitas untuk memenuhi target administratif tanpa proses deliberasi yang substantif di tingkat musyawarah desa.

Persoalan lain yang muncul adalah tumpang tindih kewenangan antara Kopdes MP dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah lebih dulu berjalan di banyak desa. Ketiadaan pemetaan kewenangan yang jelas antara kedua lembaga ekonomi desa ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan maupun duplikasi program, sehingga alih-alih memperkuat, kehadiran Kopdes MP justru dapat melemahkan kelembagaan ekonomi desa yang sudah ada.

Tantangan terhadap Demokrasi Desa

Demokrasi desa di Indonesia bertumpu pada dua pilar utama, yaitu musyawarah desa sebagai forum tertinggi pengambilan keputusan warga, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga representasi yang mengawasi jalannya pemerintahan desa. Ketika pembentukan Kopdes MP dilakukan dengan tenggat waktu yang ketat dan mekanisme top-down, ruang bagi musyawarah desa untuk benar-benar mendeliberasikan keputusan strategis, seperti struktur kepengurusan dan alokasi modal usaha, menjadi tereduksi. Warga desa lebih banyak diposisikan sebagai objek sosialisasi kebijakan ketimbang subjek yang menentukan arah kebijakan tersebut.

Kondisi ini sejalan dengan temuan kajian kebijakan yang menyoroti bagaimana program-program berbasis desa yang dirancang secara seragam secara nasional cenderung mengabaikan variasi kapasitas kelembagaan desa, sehingga desa dengan modal sosial dan partisipasi warga yang lemah lebih rentan mengalami reduksi demokrasi dibandingkan desa dengan tradisi musyawarah yang kuat.

Relasi Kekuasaan dan Potensi Elite Capture

Aktor politik yang terlibat dalam implementasi Kopdes MP tidak hanya perangkat desa, tetapi juga aktor supra-desa seperti pemerintah kabupaten, partai politik lokal, dan jaringan patronase yang telah lama mewarnai politik desa di Indonesia. Kepala desa, yang secara struktural memiliki pengaruh besar dalam proses pembentukan koperasi, berpotensi menempatkan

kerabat atau pendukung politiknya dalam struktur kepengurusan koperasi, sebuah pola yang dalam literatur ilmu politik dikenal sebagai elite capture, yakni pengambilalihan manfaat program oleh elite lokal yang seharusnya dinikmati secara kolektif oleh warga. Relasi kekuasaan ini juga berlangsung secara vertikal, antara pemerintah pusat yang menetapkan target dan skema pembiayaan program, dengan pemerintah desa yang berada di posisi pelaksana kebijakan tanpa banyak ruang tawar. Pola relasi vertikal semacam ini mencerminkan ketegangan klasik dalam kajian desentralisasi Indonesia, yaitu antara semangat otonomi desa yang diamanatkan Undang-Undang Desa dengan kecenderungan resentralisasi kebijakan melalui program-program strategis nasional yang bersifat seragam.

Peta Aktor dan Kepentingan

Untuk memperjelas relasi kekuasaan yang telah diuraikan, Tabel 1 merangkum aktor-aktor utama yang terlibat dalam implementasi Koperasi Desa Merah Putih beserta kepentingan dan potensi risikonya terhadap demokrasi desa.

Tabel 1. Peta Aktor dan Kepentingan dalam Implementasi Koperasi Desa Merah Putih

Aktor	Kepentingan	Potensi Risiko terhadap Demokrasi Desa
Pemerintah pusat	Capaian target program nasional	Resentralisasi kebijakan, seragamisasi mengabaikan konteks lokal
Kepala desa	Kendali atas struktur kepengurusan dan alokasi modal	Elite capture, patronase politik lokal
BPD dan musyawarah desa	Menjaga fungsi deliberasi dan pengawasan warga	Marjinalisasi peran akibat tenggat waktu program yang ketat
Warga desa	Manfaat ekonomi yang adil dan partisipasi bermakna	Posisi sebagai objek sosialisasi, bukan subjek pengambil keputusan

Sumber: diolah oleh penulis dari kajian kebijakan dan pemberitaan media, 2026.

Secara keseluruhan, temuan-temuan di atas menunjukkan bahwa Koperasi Desa Merah Putih berada pada persimpangan antara dua agenda besar: penguatan ekonomi desa dan penguatan demokrasi desa. Kedua agenda ini idealnya berjalan beriringan, sebagaimana ditegaskan dalam konsep desentralisasi partisipatif, di mana pemberdayaan ekonomi seharusnya memperkuat, bukan menggantikan, ruang deliberasi warga. Namun, desain kebijakan yang bersifat seragam dan berorientasi target membuat



implementasi di lapangan cenderung mengorbankan aspek partisipasi demi capaian administratif, sehingga diperlukan penyesuaian pada level implementasi agar kedua tujuan tersebut dapat berjalan secara seimbang.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Koperasi Desa Merah Putih secara desain kebijakan berpotensi memperkuat kapasitas ekonomi desa melalui konsolidasi usaha dan akses pembiayaan, namun implementasinya yang bersifat top-down dan berorientasi target administratif menimbulkan tantangan serius bagi demokrasi desa. Tantangan tersebut mencakup tereduksinya fungsi musyawarah desa dan BPD sebagai ruang deliberasi, tumpang tindih kewenangan dengan BUMDes, serta potensi elite capture oleh kepala desa dan aktor politik lokal maupun pusat. Relasi kekuasaan yang terbentuk dalam implementasi program ini mencerminkan ketegangan antara semangat otonomi desa dan kecenderungan resentralisasi kebijakan melalui program strategis nasional yang seragam.

Saran

Pertama, pemerintah pusat dan kementerian terkait perlu memberikan fleksibilitas waktu dan mekanisme dalam pembentukan Kopdes MP, agar musyawarah desa dan BPD memiliki ruang yang memadai untuk mendeliberasikan struktur kepengurusan dan alokasi modal secara substantif, bukan sekadar formalitas administratif. Kedua, perlu disusun regulasi teknis yang secara eksplisit mengatur pembagian kewenangan antara Kopdes MP dan BUMDes untuk mencegah tumpang tindih dan duplikasi program. Ketiga, diperlukan mekanisme pengawasan independen, baik oleh BPD, masyarakat sipil, maupun lembaga pengawas eksternal, untuk mencegah potensi elite capture dalam pengelolaan koperasi. Penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan pendekatan studi kasus komparatif di beberapa desa untuk mengukur secara lebih mendalam variasi dampak program terhadap demokrasi desa berdasarkan karakteristik sosial-politik masing-masing wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Eaton, K., Kaiser, K., dan Smoke, P. (2011). *The Political Economy of Decentralization Reforms: Implications for Aid Effectiveness*. Washington, D.C.: World Bank.
- Fox, J. (1996). How does civil society thicken? The political construction of social capital in rural Mexico. *World Development*, 24(6), 1089-1103.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2026). *Peraturan Menteri Desa tentang Pedoman Pembentukan dan Tata Kelola Koperasi Desa Merah Putih*. Jakarta: Kemendes PDTT.
- The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research. (2026). *Policy Assessment 2026 - Koperasi Desa Merah Putih dan Tantangan Demokrasi*. Jakarta: The Indonesian Institute.
- Antlöv, H. (2003). Village government and rural development in Indonesia: The New Democratic Framework. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 39(2), 193-214.
- Eko, S., Rasyid, M.R., Adiwibowo, S., dkk. (2014). *Desa Membangun Indonesia*. Jakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Antara News. (2026, 6 Juli). Politik kemarin: Hubungan Indonesia-Singapura hingga isu PHK Tokopedia. Diakses dari <https://www.antaranews.com>
- Kompas.com. (2026). Sorot Politik: Kilas Parlemen dan Kebijakan Desa. Jakarta: PT Kompas Cyber Media.
- Ribot, J. C. (2004). *Waiting for Democracy: The Politics of Choice in Natural Resource Decentralization*. Washington, D.C.: World Resources Institute.